



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

**KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN SIDAMULIH

e-mail : sidamulihkec11@gmail.com
Jalan Raya Sidamulih No. 80 Telp. (0265) 639858

KEPUTUSAN
CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 050/ 23 / Kpts.-Kec/ 2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RKPD, maka Rencana Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- i

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rancangan Akhir Renacana Kerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.
- KETIGA : Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sidamulih
Pada Tanggal : 11 Juli 2024
CAMAT SIDAMULIH



MEGIRIUA PARLUMI, S.E.,MM
NIP. 19770210 200901 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Bupati Pangandaran.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT SIDAMULIH KABUPATEN
PANGANDARANNOMOR : 050/ 23 / Kpts.-Kec/ 2024
TANGGAL : 11 Juli 2024

**PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN
SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
1. Kecamatan Sidamulih
- B. Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :
- I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 1.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 1.4 Review Terhadap RKPD
 - 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
 - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
 - IV. Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - V. Penutup
- C. Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidamulih Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Renja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Ditetapkan di : Sidamulih
Pada Tanggal : 11 Juli 2024
CAMAT SIDAMULIH



MEGIRIUA PARLUMI, S.E.,MM
NIP. 19770210 200901 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Renja yang telah ditetapkan untuk Tahun anggaran 2025.

Renja ini didalamnya merupakan penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian dan tingkat keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Dalam penyusunannya Renja ini kami telah berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya kami mengalami hambatan, serta keterbatasan yang ada, harapan kami semoga Renja ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program kegiatan yang dilaksanakan.

Renja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran ini kami sadari masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tentunya masukan ataupun saran yang membangun akan senantiasa kami akomodir guna perbaikan dan peningkatan Renja di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Renja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kantor Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.



Sidamulih, 11 Juli 2024
CAMAT SIDAMULIH,
MEGIBINTA PARLUMI, S.E., M.M
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19770210 200901 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
SURAT KEPUTUSAN CAMAT	i
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	12
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	13
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	20
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	21
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	25
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	26
BAB IV. RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	33
BAB V. PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renja SKPD Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Renja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja Pembangunan Daerah (RKPD).

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran maka disusunlah Renja Kecamatan Sidamulih tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Sidamulih adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah

- Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
 46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
 47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
 48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pangandaran yang telah menyusun Rancangan Renja Tahunan (RENJA) untuk tahun 2025 yang merupakan dokumen Perencanaan Kecamatan Sidamulih untuk periode 1 (satu) tahun dimaksudkan untuk menguraikan kegiatan-kegiatan Kecamatan Sidamulih secara sistematis mulai dari sasaran dan pembiayaan sesuai program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaian (target) secara langsung yang dapat terukur sebagai tindakan nyata dalam waktu satu tahun, yang selanjutnya dijadikan sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan tahunan di Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2025, yaitu :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian Program dan Kegiatan pelayanan Kantor Kecamatan Sidamulih;

2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Kecamatan Sidamulih;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen Renja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

- 1.1 Latarbelakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan.

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tugas dan fungsi Kecamatan adalah :

- a) Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- b) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti di atas.
- d) Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan.
- e) Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.
- f) Melaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari :

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kecamatan Sidamulih, sebagai berikut :

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Pangandaran

Kecamatan Sidamulih

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kecamatan Sidamulih									
	Administrasi Pemerintahan									
4.01.4.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran								
4.01.4.01.14.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah SDM Non PNS, surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	4.000 Surat	827 Surat	800 Surat	497 Surat	62,13%	800 Surat	2.124 Surat	1,29

4.01.4.01.14.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	10 Rekening	2 Rekening	2 Rekening	2 Rekening	95,36%	2 Rekening	6 Rekening	0,60
4.01.4.01.14.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin	16 Unit	-	-	-	0,00%	4 Unit	3 Unit	0,19
4.01.4.01.14.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	5 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00%	1 Orang	3 Orang	0,60
4.01.4.01.14.01.01.10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah SDM Pengamanan setiap bulan	10 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100,00%	2 Orang	6 Orang	0,60
4.01.4.01.14.01.01.11	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga	Jumlah Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga	6 Orang	-	-	-	-	2 Orang	2 Orang	0,33
4.01.4.01.14.01.01.12	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	900 Jenis	180 Jenis	180 Jenis	180 Jenis	92,07%	180 Jenis	540 Jenis	1
4.01.4.01.14.01.01.13	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	240 Jenis	48 Jenis	48 Jenis	48 Jenis	99,90%	48 Jenis	144 Jenis	0,60
4.01.4.01.14.01.01.14	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	300 Jenis	60 Jenis	60 Jenis	60 Jenis	100,00%	60 Jenis	180 Jenis	0,60
4.01.4.01.14.01.01.17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	180 Jenis	36 Jenis	36 Jenis	36 Jenis	88,77%	36 Jenis	108 Jenis	0,60

4.01.4.01.14.01.01.18	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	60 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	99,77%	12 Kali	36 Kali	0,60
4.01.4.01.14.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi di Luar daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	30 Kali	6 kali	6 Kali	6 Kali	85,17%	6 Kali	21 Kali	0,70
4.01.4.01.14.01.01.20	Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang diikuti	1.600 Kali	185 kali	200 Kali	196 Kali	94,71%	320 Kali	701 Kali	0,51
4.01.4.01.14.01.01.26	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan PATEN	15 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	100,00%	3 Orang	9 Orang	0,60
4.01.4.01.14.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
4.01.4.01.14.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara	20 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	99,07%	4 Unit	12 Unit	0,60
4.01.4.01.14.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	30 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	72,50%	6 Unit	18 Unit	0,60
4.01.4.01.14.02.25	Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer dan printer	16 Unit	14 Unit	5 Unit	1 Unit	100,00%	-	15 Unit	1,88

4.01.4.01.14.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
4.01.4.01.14.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Dokumen	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	5 Laporan	15 Laporan	0,75
4.01.4.01.14.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	2 Laporan	6 Laporan	0,60
4.01.4.01.14.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	3,00
4.01.4.01.14.06.5	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah SDM Simda Perencanaan setiap bulan	5 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00%	1 Orang	3 Orang	0,60
4.01.4.01.14.06.06	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SDM Simda Keuangan setiap bulan	5 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00%	1 Orang	3 Orang	0,60
4.01.4.01.14.06.07	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah SDM Simda BMD setiap bulan	5 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00%	1 Orang	3 Orang	0,60

4.03.4.01.14.21.14	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%	2 Kegiatan	6 Kegiatan	0,60
4.03.4.01.14.21.32	Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	Jumlah Desa yang dimonitor dalam rangka Pelaksanaan Musrenbang Desa	21 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	100,00%	7 Desa	21 Desa	0,60

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian Kinerja Kecamatan Sidamulih berdasarkan sasaran strategis dilakukan dengan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Tahun 2024, sasaran dari capaian kinerja meliputi :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidamulih
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator	SPM/ Standar dan Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumah Pelayanan Pembuatan e-KTP	100 %	%	21.356	21.356	21.356	21.356	17.129	21.208	80 %	80 %	
2.	Jumlah Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100 %	%	11.373	11.373	11.373	11.373	1.606	2.439	85 %	85 %	
3.	Jumlah Pelayanan Pembuatan IMB	100 %	%	80 Lembar	70 Lembar	80 Lembar	70 Lembar	28 Lembar	3 Lembar	75 %	80 %	
4.	Jumlah Pelayanan Pembuatan HO/ IUMK	100 %	%	50 lembar	50 lembar	50 Lembar	50 Lembar	14 Lembar	0	75 %	85 %	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sidamulih bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pangandaran;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company / Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal) dimana pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat mencapai MDGs (Millenium Develompment Goals);
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah Kebijakan dan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Sidamulih harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.31 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Sidamulih.

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran**

Nama SKPD : Kecamatan
Sidamulih

**Tabel
T-C.31**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kecamatan Sidamulih				3.471.951.750	Kecamatan Sidamulih				3.471.951.750	
	Unsur Kewilayahan				3.471.951.750	Unsur Kewilayahan				3.471.951.750	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi; 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik; 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur; 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.	100%	3.138.002.519	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi; 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik; 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur; 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.	100%	3.138.002.519	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun tepat waktu; 2. Persentase Dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu; 3. Persentase Dokumen Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	90.086.872	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun tepat waktu; 2. Persentase Dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu; 3. Persentase Dokumen Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	90.086.872	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	78.074.597	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	78.074.597	Baru
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.662.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.662.000	Baru
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.662.000,	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.662.000,	Baru

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.662.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.662.000	Baru
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.662.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.662.000	Baru
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.364.275	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.364.275	Baru
	Administrasi Keuangan Daerah		Persentase Unit Kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	2.354.278.636	Administrasi Keuangan Daerah		Persentase Unit Kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	2.354.278.636	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sidamulih	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang/bulan	2.274.438.468	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sidamulih	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang/bulan	2.274.438.468	Baru
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	77.425.734	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	77.425.734	Baru

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.251.140	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.251.140	Baru
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1.163.294	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1.163.294	Baru
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	59.668.730	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	59.668.730	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.069.360	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.069.360	Baru
	Penatausahaan Baraang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	53.599.370	Penatausahaan Baraang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	53.599.370	Baru
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	100%	122.900.813	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	100%	122.900.813	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sidamulih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	12.108.373	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sidamulih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	12.108.373	Baru
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	33.275.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	33.275.000	Baru
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.312.440	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.312.440	Baru
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Sidamulih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	73.205.000,	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Sidamulih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	73.205.000,	Baru
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	100%	100.941.665	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	100%	100.941.665	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sidamulih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1.072.790	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sidamulih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1.072.790	Baru
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sidamulih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.223.834	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sidamulih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.223.834	Baru
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Kec. Sidamulih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.408.166	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Kec. Sidamulih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.408.166	Baru

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.775.628	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.775.628	Baru
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sidamulih	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.972.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sidamulih	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.972.000	Baru
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	42.489.247	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	42.489.247	Baru
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	145.911.655	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	145.911.655	
	Pengadaan Mebel	Kec. Sidamulih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	8.818.655	Pengadaan Mebel	Kec. Sidamulih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	8.818.655	Baru
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sidamulih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	123.783.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sidamulih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	123.783.000	Baru
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sidamulih	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.310.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sidamulih	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.310.000	Baru
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	187.855.743	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	187.855.743	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	1.437.480	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	1.437.480	Baru
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.842.233	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.842.233	Baru
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.576.030	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.576.030	Baru
	Pemeliharaan Barangg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Prasaraana yang baik dan layak fungsi	100%	76.358.405	Pemeliharaan Barangg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Prasaraana yang baik dan layak fungsi	100%	76.358.405	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sidamulih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	61.717.405	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sidamulih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	61.717.405	Baru
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sidamulih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	14 Unit	7.986.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sidamulih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	14 Unit	7.986.000	Baru
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sidamulih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	4.658.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sidamulih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	4.658.500	Baru

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sidamulih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1.996.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sidamulih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1.996.500	Baru
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	246.288.240	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	246.288.240	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	228.399.600	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	228.399.600	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	228.399.600	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	228.399.600	Baru
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	17.888.640	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	17.888.640	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	17.888.640	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	17.888.640	Baru
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	4.305.785	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	4.305.785	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	4.305.785	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	4.305.785	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sidamulih	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	4.305.785	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sidamulih	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	4.305.785	Baru
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	4.305.785	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	4.305.785	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum	100%	4.305.785	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum	100%	4.305.785	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 Laporan	4.305.785	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 Laporan	4.305.785	Baru

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	4.638.535	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	4.638.535	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	4.638.535	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	4.638.535	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10 Dokumen	4.638.535	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10 Dokumen	4.638.535	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	74.410.886	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	74.410.886	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	74.410.886	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	74.410.886	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	3.191.738	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	3.191.738	

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipati	7 Dokumen	53.330.508	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Sidamulih	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipati	7 Dokumen	53.330.508	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	5 Laporan	17.888.640	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Sidamulih	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	5 Laporan	17.888.640	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2025, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kantor Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan musrenbang kabupaten.

Penelaahan / review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat dalam bentuk hasil musrenbang untuk Kecamatan Sidamulih tidak ada usulan.

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.32 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran**

Kecamatan Sidamulih

Tabel T-C.32

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Sidamulih dalam kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kebijakan Pembangunan Nasional “Nawa Cita”

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara;
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Tematik Sektoral Jawa Barat

CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan

1. Jabar bebas putus jenjang sekolah, Beasiswa Pemuda, Keluarga Atlit, Guru, Tenaga Medis, Bantuan Pendidikan dan Sekolah Gratis
2. Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas
3. Pendidikan berkebutuhan khusus
4. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi serta Pembangunan Perguruan Tinggi di Luar Domisili dan Penegrian
5. Peningkatan fasilitas pendidikan, Fasilitas Laboratorium, Ruang Kelas Baru, Kobong Pondok Pesantren dan kompetensi tenaga pendidik

CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan

1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan
2. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak serta Layanan Jaminan Kesehatan
3. Peningkatan Fasilitas dan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa
4. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku

1. Penangan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya
2. Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan
3. Infrastruktur jalan dan perhubungan, Pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Strategis Lainnya, Air Strip serta Pembangunan Jalan Tol, Jalan Lintas Cepat, Monorel, Kereta Api, dan LRT (Light Rail Transit)
4. Infrastruktur sumber daya air, dan irigasi strategis serta Pengendalian Banjir;
5. Kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan serta Sanitasi Lingkungan, Kawasan Aetropolis Kertajati dan Pengembangan Kota Baru;

6. Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan Peningkatan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga
7. Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat

CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian

1. Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional
2. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry
3. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Pencetakan Sawah Baru, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani
4. Jawa Barat bebas rawan pangan
5. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan

CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian

1. Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM
2. Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi
3. Pengembangan skema pembiayaan alternative
4. Pengembangan industry manufaktur
5. Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif serta Menciptakan Pengusaha Besar Berkelas Dunia

CG 6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan

1. Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral
2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%
3. Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional
4. Penanganan bencana longsor dan banjir

CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga

1. Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan
2. Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat
3. Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat yang diakui Nasional dan Internasional serta Pembangunan Pusat Seni dan Budaya Bertaraf Internasional
4. Pengembangan Destinasi wisata Siap Kunjung dan Destinasi Wisata Dunia

CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan

1. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana
2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga serta Posyandu
3. Peningkatan pengelolaan dan Pengendalian kependudukan

CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan

1. Pengurangan Kemiskinan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
2. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
3. Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat serta Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Infrastruktur Strategis

CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan

1. Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur yang diakui Badan Survey Nasional dan Internasional serta Modernisasi Tatakelola Pemerintahan
2. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik serta Pembangunan Sarana Peribadatan Bersifat Monumental
3. Penataan sistem hukum dan penegakan hukum
4. Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak
5. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan dan Pelaporan yang terpercaya dan diakui oleh Lembaga Audit Skala Nasional
6. Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan, Optimalisasi Peran UPTD dan Infrastruktur Perdesaan

Tematik Kewilayahan Jawa Barat

WKPP I (wilayah BOGOR)

1. Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas lokal;
2. Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global;
3. Pengembangan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya;
4. Pengembangan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas.
5. Pembangunan Wilayah Desa dan Kecamatan Perbatasan Antar Provinsi

WKPP II (wilayah purwakarta)

1. Pengembangan industri manufaktur;
2. Pengembangan industri keramik dan gerabah;
3. Pengembangan industri perberasan dan makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau, serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal;
4. Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah);
5. Pembangunan Wilayah Desa dan Kecamatan Perbatasan Antar Provinsi

WKPP III (wilayah cirebon)

1. Pengembangan industri mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan;
2. Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija;
3. Pengembangan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan berbahan baku lokal;
4. Pelestarian keraton, wisata sejarah, wisata ziarah (pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata;
5. Pembangunan Wilayah Desa dan Kecamatan Perbatasan Antar Provinsi

WKPP IV (wilayah priangan)

1. Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor;
2. Pengembangan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak;
3. Pengembangan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor;
4. Pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata;
5. Pembangunan Wilayah Desa dan Kecamatan Perbatasan Antar Provinsi

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten

Visi & Misi Bupati Pangandaran 2021 – 2026

Visi :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

Misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beraga;
2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan;
3. Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan;
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel.

Prioritas Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai Lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya;
2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya;
3. Peningkatan Kualitas dan Aksetabilitas Layanan Kesehatan;
4. Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana;
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemetaan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksetabilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis;
6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sidamulih

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Sidamulih mempunyai arah yang dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan : 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

Sasaran : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Sidamulih maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran Berjalan 2024 dan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.1.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 2.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 2.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3.1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 3.1.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 3.1.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 4.1.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 4.1.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 4.1.3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 4.1.4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 5.1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 5.1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5.1.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5.1.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 5.1.5 Penyediaan Bahan/Material
- 5.1.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 6.1.1 Pengadaan Mebel
- 6.1.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6.1.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8.1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 8.1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 8.1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 8.1.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8.1.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
 - 2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 2.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
 - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - 4.1.1 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
 - 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**
 - 5.1.1 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - 6.1 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - 6.1.1 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 6.1.2 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - 6.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.33 : Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Sidamulih

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SIDAMULIH KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr aOPD	Realis asi Capaia n RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraa nCapaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggun gljawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasio nal					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						KECAMATAN SIDAMULIH						3.471.951.750						3.819.136.928					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.471.951.750							3.819.136.928				
	7	01				KECAMATAN						3.138.002.519							3.451.802.772				
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentasepeningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%			100 %	3.138.002.519						100%	3.451.802.772				
	7	01	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaankinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%			100 %	90.086.872			-	Reformasi Birokrasi,Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	99.095.559				
	7	01	01	2.0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																85.882.056	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 1	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																2.928.200	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 1	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokumen	2.662.000	Kab. Pangandaran,	PENDAPATA N ASLI	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan			2.928.200	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.662.000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2.928.200	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.662.000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2.928.200	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1.364.275	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1.500.703	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%			100 %	2.354.278.636			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	2.589.706.500	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/ bulan	2.274.438.468	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2.501.882.315	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	77.425.734	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		85.168.308	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.251.140	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1.376.254	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.163.294	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1.279.623	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%			100 %	59.668.730			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	65.635.603	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.069.360	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		6.676.296	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	53.599.370	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		58.959.307	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%			100 %	122.900.813			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	135.190.895	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	12.108.373	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13.319.211	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	33.275.000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		36.602.500	KECAMATAN SIDAMULIH

	7	01	01	2.0 5	00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 Dokumen	4.312.440	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4.743.684	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 5	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					11 Orang	73.205.000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		80.525.500	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 6		Administrasi UmumPerangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerahyang baik	100%				100 %	100.941.665			-	Reformasi Birokrasi,Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	111.035.832	
	7	01	01	2.0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1.072.790	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1.180.069	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	30.223.834	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		33.246.218	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	6.408.166	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		7.048.983	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	4.775.628	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5.253.191	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 6	00 07	Penyediaan Bahan/Material															
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	15.972.000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		17.569.200	KECAMATAN SIDAMULIH

	7	01	01	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	42.489.247	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		46.738.171	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%			100 %	145.911.655			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	160.502.820	
	7	01	01	2.0 7	00 05	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	8.818.655	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		9.700.520	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 7	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	123.783.000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		136.161.300	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 7	00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	13.310.000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		14.641.000	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pemerintahan yang disediakan	100%			100 %	187.855.743			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	206.641.317	
	7	01	01	2.0 8	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	1.437.480	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1.581.228	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	35.842.233	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		39.426.456	KECAMATAN SIDAMULIH

	7	01	01	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	150.576.030	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		165.633.633	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%			100 %	76.358.405			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	83.994.246	
	7	01	01	2.0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	61.717.405	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		67.889.146	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	7.986.000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		8.784.600	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	4.658.500	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5.124.350	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	01	2.0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.996.500	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2.196.150	KECAMATAN SIDAMULIH
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100% 100%			100 %	246.288.240						100% 100%	270.907.064	
	7	01	02	2.0 1		Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100% 100%			100 %	228.399.600			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100% 100%	251.239.560	

	7	01	02	2.0 1	00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	228.399.600	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		251.239.560	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	02	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamata	100% 100%			100 %	17.888.640			-	Reformasi Birokrasi,Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100% 100%	19.667.504	
	7	01	02	2.0 2	00 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	17.888.640	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		19.667.504	KECAMATAN SIDAMULIH
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100% 100%			100 %	4.305.785						100% 100%	4.736.364	
	7	01	03	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa	100% 100%			100 %	4.305.785			-	Reformasi Birokrasi,Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100% 100%	4.736.364	
	7	01	03	2.0 1	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyara katan	4.305.785	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4.736.364	KECAMATAN SIDAMULIH
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan keteribanumum	100% 100%			100 %	4.305.785						100% 100%	4.736.364	
	7	01	04	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum	Persentase upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum	100%			100 %	4.305.785			-	Reformasi Birokrasi,Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100%	4.736.364	
	7	01	04	2.0 1	00 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	4.305.785	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4.736.364	KECAMATAN SIDAMULIH
5	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN NURUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100% 100%		100 %	4.638.535						100% 100%	5.102.389	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100% 100%		100 %	4.638.535			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100% 100%	5.102.389	
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				10 Dokumen	4.638.535	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5.102.389	KECAMATAN SIDAMULIH
6	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100% 100%		100 %	74.410.886						100% 100%	81.851.975	
	7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100% 100%		100 %	74.410.886			-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100% 100%	81.851.975	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	3.191.738	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3.510.912	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				7 Dokumen	53.330.508	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		58.663.559	KECAMATAN SIDAMULIH
	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														

							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	17.888.640	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		19.677.504	KECAMATAN SIDAMULIH
	J U M L A H											2.167.094.524							3.819.136.928	

BAB IV

RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Sidamulih Tahun Anggaran 2025 program dan kegiatannya dijelaskan dalam RKA Kecamatan Sidamulih Tahun 2025 adalah sebagai berikut

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupataen/Kota sebesar Rp. 3.138.002.519,-

a. *Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. *Administrasi Keuangan*

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) **Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar Rp. 246.288.240,-**
 - a. ***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. ***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***
 - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di WilayahKecamatan
- 3) **Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar Rp. 4.305.785,-**
 - a. ***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. ***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***
 - a. Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan
- 4) **Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 4.305.785,-**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5) **Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebesar Rp. 4.638.535,-**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- 6) **Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar Rp. 74.410.886,-**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Dalam hal pendanaan agar pelaksanaan Rencana Kerja yang sudah ditentukan berjalan dengan lancar dan anggaran tersebut terdapat dalam RKA Kecamatan Sidamulih Tahun 2025, dalam pelaksanaan program dan kegiatan seluruhnya menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

BAB V

PENUTUP

Demikian Renja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah dan sasaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan Pembangunan, selanjutnya. yang nantinya akan dievaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang. Sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya , Renja bukan mutlak tetapi harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Pangandaran. Agar pendayaguna aparatur Negara Khususnya di Lingkungan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran nantinya dapat mewujudkan Kecamatan Sidamulih yang terdepan dalam agribisnis dan destinasi wisata yang mendunia dengan tetap mempertahankan agama sebagai pandangan hidup di tahun 2026, dengan rencana Kabupaten Pangandaran untuk **“MEWUJUDKAN KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”**.

Sidamulih, 11 Juli 2024
CAMAT SIDAMULIH,

MEGIRIJA PARLUMI, S.E., MM
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19770210 200901 1 007